

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro dari aspek efektivitas menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 115,29%, yang berarti realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Dari aspek efisiensi, kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro tergolong tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 103,06%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja masih relatif tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah.
3. Tingkat serapan APBD Kabupaten Bojonegoro selama periode 2022–2025 memiliki rata-rata sebesar 80,51%, sehingga masih terdapat anggaran yang belum terealisasi dan berkontribusi terhadap terbentuknya SILPA.
4. Perkembangan SILPA Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren yang cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -8,79%. Meskipun demikian, nilai SILPA yang masih relatif besar menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal.

5. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan APBD Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi aspek efektivitas pendapatan. Namun demikian, pada pemenuhan Asas Efisiensi dan Efektivitas Belanja, Kabupaten Bojonegoro masih memiliki defisit kinerja berupa tingginya SILPA akibat rendahnya daya serap anggaran program. Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan inovasi tata kelola pelaksanaan anggaran agar kemakmuran fiskal yang bersumber dari kekayaan alam daerah dapat didistribusikan secara adil, patut, dan memberi manfaat optimal bagi kemaslahatan masyarakat Bojonegoro.

B. Keterbatasan

Analisis penelitian memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, difokuskan pada aspek kinerja APBD berdasarkan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah (SILPA), serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. Penelitian ini belum menganalisis secara mendalam faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan fiskal nasional, kondisi makroekonomi, maupun dinamika transfer pemerintah pusat yang juga dapat memengaruhi kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Sugiyono, (2020), setiap penelitian memiliki batasan ruang lingkup yang ditentukan oleh fokus penelitian, ketersediaan data, waktu, dan sumber daya peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini

merupakan gambaran kondisi yang sesuai dengan data dan informasi yang tersedia selama proses penelitian berlangsung.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan tetap dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja APBD Kabupaten Bojonegoro selama Tahun Anggaran 2022–2025. Selain itu, keterbatasan ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian, memperpanjang periode analisis, serta mengintegrasikan faktor-faktor eksternal sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

C. Saran

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya didasarkan pada kesimpulan dalam penelitian ini. Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah agar lebih efisien dalam merencanakan anggaran belanja daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan sasaran serta meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur daerah dalam menyusun perencanaan anggaran untuk mewujudkan APBD yang berkualitas.
2. Pemerintah daerah agar memprioritaskan alokasi belanja modal dan menekan pengeluaran untuk belanja operasi terutama belanja pegawai. Belanja modal berperan penting untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset serta pengembangan sarana dan

prasarana kepentingan umum dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

3. Penerapan prinsip SMART dalam pengelolaan APBD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya target yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang pasti, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta meminimalkan terjadinya SILPA yang berlebihan pada akhir tahun anggaran.

D. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kinerja keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dari segi efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan menunjukkan kinerja yang bagus, tetapi dari segi kemandirian masih memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih harus meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan sendiri dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah meskipun dilihat dari sisi efektivitas, pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah.

Kualitas perencanaan anggaran juga harus mendapat perhatian agar menghasilkan APBD yang berkualitas sehingga berdampak pada kinerja keuangan daerah. Adanya APBD yang berkualitas diharapkan mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya kinerja keuangan daerah yang baik akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas pelaksanaan anggaran dan yang paling utama adalah mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2015). Implementing Performance Measurement Systems in Indonesian Local Government: Challenges and Prospects. *Public Administration and Development*, 35(1), 3–15. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Akuba, I. A., & Kusumawati, A. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA SEBELUM DAN PADA MASA JABATAN GIBRAN RAKABUMING RAKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN RASIO KEUANGAN. *Al-Buhuts*, 20(1), 346–362. <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/1497>
- Bastian, I. (2015). Evaluasi Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 101–115.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010a). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 123–136.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010b). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 45–58.
- Dwiyanto, A. (2012). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 1–15.
- Ferian, F. L. I., & Achmad, K. (2024). Analisis Kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1), 103–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/tiara.2024.2.1.106>
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 23–37.
- Indonesia, R. (2005). *Presiden republik indonesia*.
- Juwita, R. (2016). Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–67.
- Kanoli, A. D. S., & Zuhroh, S. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(8), 1009–1017. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.3993>

- Kurrohman, T. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Rasio Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 7(2), 115–128.
- Mahmudi. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 89–102.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018b). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Nabila, P., Maulina, I., Islam, U., Sultanah, N., Lhokseumawe, N., Governance, G., & Kinerja, A. (2025). *EFEKTIVITAS AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/6802>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nugroho, R. (2018). Kinerja Anggaran dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 13–28.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(4), 1–15.
- Prasetyo, B., & Lestari, S. (2019). Analisis Serapan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kinerja OPD. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(3), 201–216.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. World Bank.
- Sari, D., & Pratama, R. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja APBD. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(2), 101–115.
- Sari, R. P., & Pratama, A. (2020). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(1), 45–60.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Sianturi, T. U., & Hwihanus, H. (2024). Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran & Pengawasan Keuangan Dalam Pelaksanaan Apbd Tahun 2022 Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan*

Kewirausahaan, 4(1), 79–91.

<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2671>

Simanjuntak, R. M. P., Purba, S., & Butar, E. A. B. (2022). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 5(1), 46–59.

<https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v5i1.129>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (2 (ed.)). Alfabeta.

Susantih, H., & Saftiana, Y. (2008). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).

Wibowo, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis APBD. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 9(1), 33–47.

Zein, R. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 101–112.